

**Judul** : Senayan senang Indonesia swasembada beras, kedaulatan pangan terwujud  
**Tanggal** : Jumat, 09 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Senayan Senang Indonesia Swasembada Beras Kedaulatan Pangan Terwujud

Senayan mengapresiasi capaian swasembada beras era pemerintahan Prabowo Subianto. Prestasi ini adalah hasil dari kerja keras banyak pihak dan berkat dukungan penuh dari orang nomor satu di Indonesia.

ANGGOTA Komisi IV DPR Usman Husin menegaskan, swasembada beras ini menandakan kebutuhan beras domestik telah terpenuhi tanpa ketergantungan pada impor. Namun, keberhasilannya ini tidak boleh berhenti pada angka produksi semata. "Negara wajib memastikan petani hidup sejahtera pasca swasembada beras," tegasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia resmi mencapai swasembada beras pada Rabu (31/12/2025). Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam ketahanan pangan nasional. Swasembada beras ini salah satunya ditandai dengan tidak adanya impor beras sepanjang tahun 2025.

Usman melanjutkan, jika negara sudah swasembada, tetapi petaninya tetap miskin, maka ada yang keliru dalam tata kelola pangan. Karena itu, swasembada harus dimaknai sebagai jaminan hasil panen petani terserap secara maksimal dengan harga yang adil.

"Bukan justru menekan petani di hulu," ucapnya.

Dengan capaian swasembada ini, lanjutnya, Indonesia seharusnya lebih terlindungi dari gejolak harga pangan global, krisis geopolitik, maupun gangguan rantai pasok internasional. Swasembada juga membuka peluang penguatan sektor pertanian nasional. Khususnya melalui perbaikan infrastruktur irigasi, distribusi pupuk, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern.

Namun, ia mengingatkan capaian swasembada tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Berbagai data menunjukkan, sebagian besar petani Indonesia masih berada pada kelompok pendapatan rendah, dengan kepemilikan lahan sempit dan biaya produksi yang terus meningkat.

"Harga gabah di tingkat petani juga kerap tidak stabil dan sering kali tidak mencerminkan biaya produksi yang mereka keluarkan," ungkap politikus PKB ini.

Selain itu, tantangan utama pasca



Usman Husin

swasembada adalah memastikan keberpihakan kebijakan pada petani. Mulai dari penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) yang realistis, penguatan peran Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menyerap gabah, hingga perlindungan petani dari praktik tengkulak dan permainan pasar.

"Tanpa intervensi negara yang kuat, surplus produksi justru berpotensi menurunkan harga di tingkat petani," kata legislator asal daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Pemerintah, lanjutnya, harus memastikan tidak ada impor beras, baik langsung maupun terselelubung, atas nama apa pun sela-

ma stok dalam negeri mencukupi. Sebab lemahnya pengawasan impor dapat merusak harga pasar dan memukul petani lokal dan menciderai target swasembada yang telah tercapai.

Ke depan, harap dia, Pemerintah harus menjadikan kesejahteraan petani sebagai salah satu indikator keberhasilan swasembada pangan. "Bukan hanya soal cukup atau tidaknya beras, tapi apakah petani bisa hidup layak, menyekolahkan anaknya, dan berproduksi secara berkelanjutan," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari menambahkan, swasembada pangan merupakan capaian strategis yang patut diapresiasi. Sebuah fakta karena Indonesia tidak mengimpor beras sepanjang 2025 menunjukkan penguatan kapasitas produksi pangan nasional.

"Swasembada beras sebagai langkah penting dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia," ucap Kharis dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Diketahui, Pemerintah menyampaikan cadangan beras Pemerintah yang dikelola Perum Bulog pada akhir 2025 mencapai lebih dari 3 juta ton. Jumlah tersebut merupakan tertinggi sepanjang sejarah.

"Kondisi ini memberi ruang yang lebih kuat bagi negara dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan," ucap politikus PKS ini.

Meski demikian, Kharis mengingatkan agar capaian swasembada pangan tidak berhenti pada aspek produksi dan cadangan. Indikator keberhasilan utama tetap terletak pada stabilitas harga pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Keberhasilan swasembada harus dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat. Caranya harga gabah di tingkat petani dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen harus terus dijaga.

Kharis berharap, upaya penguatan pangan nasional juga diarahkan pada percepatan swasembada komoditas strategis lainnya. Seperti jagung, kedelai, bawang putih, serta komoditas protein hewani. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh.

"Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pangan nasional berjalan secara berkelanjutan, berbasis data, dan berpihak pada petani," tutup legislator asal dapil Jawa Tengah (Jateng) ini. ■ TIF